

KAJIAN KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN Kabupaten Kutai Kartanegara

Oleh: Suyadi

Tenggarong, Desember 2022



BALITBANGDA
Kabupaten Kutai Kartanegara

**KERJASAMA
ANTARA**



ULS-PPID
Universitas Mulawarman

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terintegrasi yang terdiri atas berbagai subsistem, subsistem utamanya adalah

- 1) ketersediaan pangan,
- 2) keterjangkauan dan
- 3) pemenuhan konsumsi pangan.

Terwujudnya ketahanan pangan merupakan sinergi dari interaksi ketiga subsistem tersebut.

Subsistem ketersediaan pangan mencakup aspek produksi, cadangan serta keseimbangan antara impor dan ekspor pangan

Penumbuhan dan pengembangan lumbung pangan masyarakat (LPM) merupakan upaya untuk memastikan tersedianya cadangan pangan pada level kelompok masyarakat. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dalam Pasal 32 ayat 2 dinyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan cadangan pangan masyarakat sesuai dengan kearifan lokal

Pedoman Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)
Peraturan Menteri Pertanian
Nomor: 17/Permetan/HK.140/4/2015)
digunakan sebagai acuan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Tahun 2015 dengan aktivitas-aktivitas prioritas nasional.



Adapun rumusan/pokok permasalahan dari Tema/Topik Kajian Kebijakan Ketahanan Pangan ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

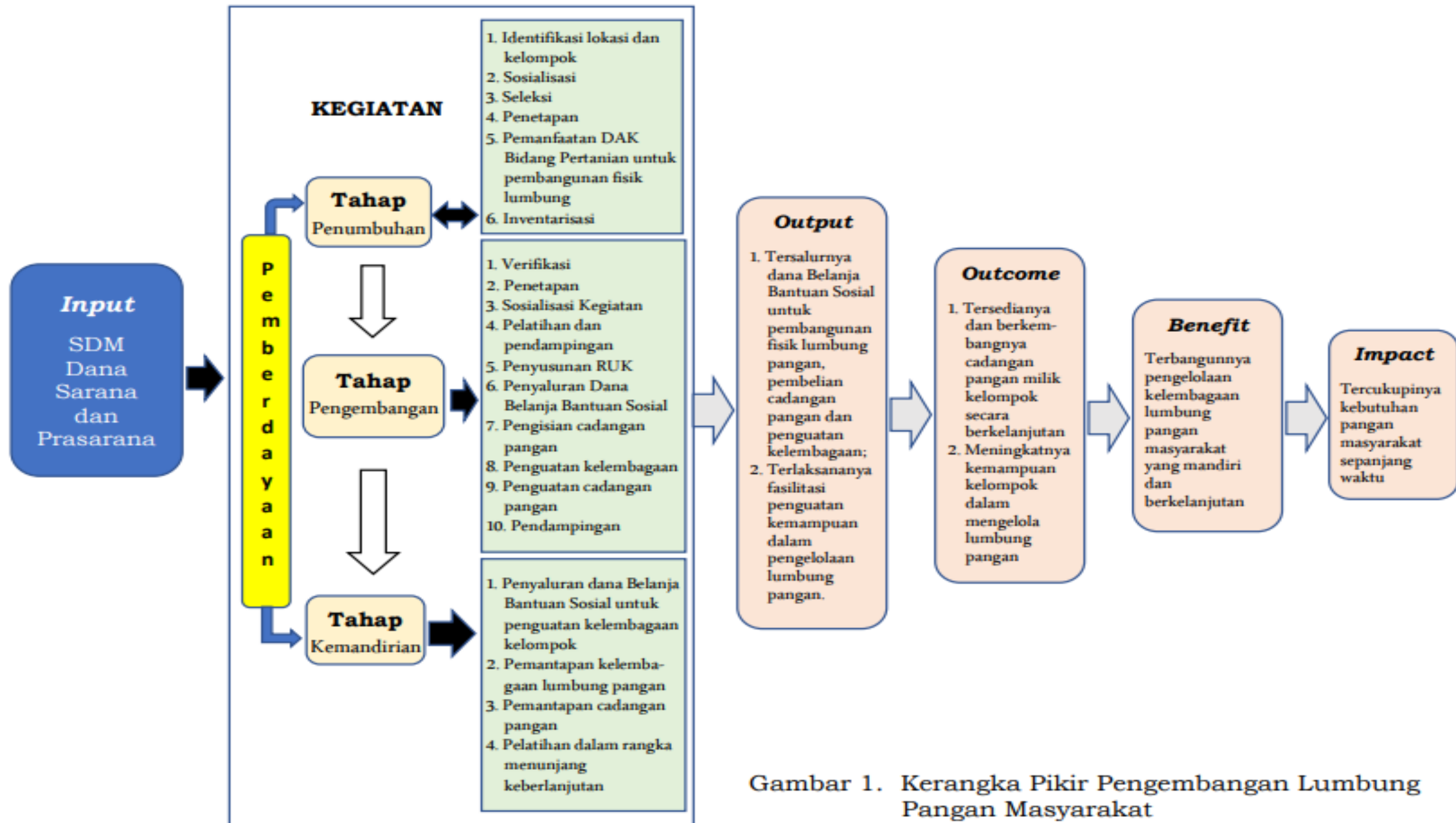
- 1) Bagaimana kondisi LPM yang dibangun melalui alokasi pembiayaan APBN, APBD-Provinsi dan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 2) Bagaimana tata kelola/pengelolaan, pola kemitraan dan permasalahan yang dihadapi dalam memanfaatkan keberadaan LPM.
- 3) Bagaimana pola pembinaan dan pendampingan LPM yang telah dilakukan oleh Instansi berwenang/pemangku kepentingan lainnya.
- 4) Rekomendasi apa yang diperlukan/dirumuskan dalam rangka perbaikan dan pengembangan program dan kegiatan dalam implementasi kebijakan ketahanan pangan, khususnya dalam hal pengelolaan LPM di Kabupaten Kutai Kartanegara pada masa mendatang.



Tujuan Kajian Kebijakan Ketahanan Pangan (khususnya terkait dengan pengelolaan LPM) ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kondisi LPM yang dibangun melalui alokasi pembiayaan APBN, APBD-Provinsi dan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Untuk Mengetahui tata kelola/pengelolaan, pola kemitraan dan permasalahan yang dihadapi dalam memanfaatkan keberadaan Lumbung Pangan Masyarakat.
3. Untuk mengetahui pola pembinaan dan pendampingan Lumbung Pangan Masyarakat yang telah dilakukan oleh Instansi berwenang/pemangku kepentingan lainnya.
4. Menyusun rekomendasi perbaikan dan pengembangan program dan kegiatan dalam implementasi kebijakan ketahanan pangan, khususnya dalam hal pengelolaan LPM di Kabupaten Kutai Kartanegara pada masa mendatang.





Gambar 1. Kerangka Pikir Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat

Ruang lingkup Kajian Kebijakan Ketahanan Pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara ini difokuskan pada upaya mencermati dan mengevaluasi program pembangunan LPM yang telah dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan. Kegiatan evaluasi mencakup aspek tata kelola dan pola kemitraan LPM serta pola pembinaan dan pendampingan yang telah dilakukan oleh Instansi/ Pemangku kepentingan. Lokasi Kajian meliputi delapan kecamatan, sebagai berikut:

METODE PENDEKATAN KAJIAN

No	Kecamatan	Desa
1	Anggana	SidoMulyo
2	Samboja	Karya Jaya
3	Marang Kayu	Sebuntal
4	Muara Jawa	Tama Pole
5	Tenggarong Seberang	Loa Lepu
6	Loa Kulu	Sumber Sari
7	Kota Bangun	Muhuran
8	Muara Kaman	Panca Jaya

Prosedur Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam kajian ini meliputi data primer dan data sekunder, jenis data dan prosedur pengumpulan data tersebut dilakukan sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan data sekunder dan informasi lain yang terkait dengan tema Kajian (program pembangunan dan pengelolaan LPM), diperoleh dari Organisasi Perangkat Daerah, utamanya dari Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian dan Peternakan.
- 2) Pengumpulan data primer dari lapangan/kecamatan serta melakukan interview/wawancara dengan pengelola LPM serta PPL dan UPT Dinas Pertanian dan Peternakan.

Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang diperoleh dalam kajian ini selanjutnya ditabulasi, dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif dan komparatif dengan menggunakan standar Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 17/2015. Untuk keperluan analisis, data dan informasi yang bersifat kualitatif dikuatifikasi dengan menggunakan sistem skoring

No	Indikator Tujuan	Skor	Keterangan Skoring	Tujuan 1. Untuk mengetahui kondisi LPM yang dibangun melalui alokasi pembiayaan APBN, APBD-Provinsi dan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara.
1.1	Sumber Dana APBN	1	Rusak atau dialih fungsikan	
		2	Kondisi baik tetapi tidak difungsikan	
		3	Kondisi baik dan difungsikan sebagai lumbung	
1.2	Sumber Dana APBD Provinsi	1	Rusak atau dialih fungsikan	
		2	Kondisi baik tetapi tidak difungsikan	
		3	Kondisi baik dan difungsikan sebagai lumbung	
1.3	Sumber Dana APBD Kabupaten	1	Rusak atau dialih fungsikan	
		2	Kondisi baik tetapi tidak difungsikan	
		3	Kondisi baik dan difungsikan sebagai lumbung	

Tujuan 2. Untuk Mengetahui tata kelola/penge- lolaan, pola kemitraan dan permasalahan yang dihadapi dalam memanfaatkan keberadaan Lumbung Pangan Masyarakat.	No	Indikator Tujuan	Skor	Keterangan Skoring
	2.1	Tata Kelola/ pengelolaan LPM	1	Tidak memiliki SK pengurus LPM dan RUK
			2	Memiliki salah satu dari SK pengurus LPM atau RUK
			3	Memiliki kedua dokumen (SK dan RUK) tersebut
	2.2	Pola kemitraan	1	Belum pernah mempunyai mitra pengelolaan LPM
			2	Memiliki mitra tetapi tidak aktif dalam Kerjasama
			3	Memiliki mitra dan aktif dalam pengembangan LPM
	2.3	Permasalahan dalam pengelolaan LPM	1	Sangat banyak permasalahan yang harus dihadapi
			2	Menghadapi banyak masalah tetapi dapat diatasi
3			Relatif tidak menghadapi masalah yang berat.	

Tujuan 3. Untuk mengetahui pola pembinaan dan pendampingan Lumbung Pangan Masyarakat yang telah dilakukan oleh Instansi berwenang/pemangku kepentingan lainnya.

No	Indikator Tujuan	Skor	Keterangan Skoring
3.1	Pembinaan dan pendampingan LPM	1	Tidak pernah ada pembinaan atau pendampingan dari manapun
		2	Pernah mendapat pembinaan dan pendampingan
		3	Mendapat pembinaan dan pendampingan secara rutin
3.2	Jumlah OPD atau para pihak yang pernah melakukan pembinaan/ pendampingan LPM	1	Tidak ada yang melakukan pendampingan/ pembinaan
		2	Hanya satu OPD/para pihak yang pernah melakukan pembinaan/ pendampingan
		3	Dua atau lebih OPD/para pihak yang pernah melakukan pembinaan/ pendampingan
3.3	Eksistensi LPM	1	Tidak diperlukan
		2	Diperlukan dengan pembinaan dan dukungan pengelolaan.
		3	Sangat diperlukan dan harus dikembangkan

Keterangan Skor: 1 = rendah atau kurang; 2 = sedang; 3 = tinggi atau baik.

GAMBARAN UMUM WILAYAH

Tabel 4.1. Penduduk, laju pertumbuhan penduduk, dan distribusi di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur (BPS KALTIM, 2022).

Kabupaten/Kota	Penduduk		Laju Pertumbuhan Penduduk/Tahun	
	2020	2021	2010-2020	2020-2021
Kabupaten				
Paser	275.452	277.602	1,75	0,58
Kutai Barat	172.288	173.982	2,02	0,74
Kutai Kartanegara	729.382	733.626	1,48	0,44
Kutai Timur	434.459	449.161	5,27	2,53
Berau	248.035	252.648	3,20	1,39
Penajam Paser Utara	178.681	180.657	2,18	0,83
Mahakam Ulu	325.13	329.69	2,58	1,05
Kota				
Balikpapan	688.318	695.287	2,06	0,76
Samarinda	827.994	831.460	1,26	0,31
Bontang	178.917	180.843	2,15	0,81
Kalimantan Timur	3.766.039	3.808.235	2,13	0,84

Tabel 4.2. Produksi Beras Tahun 2020 dan 2021 Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur (BPS KALTIM, 2021)

(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021)

Kabupaten/Kota	Produksi Beras (Ton-Beras)			
	2020	2021	Perkembangan	
			Absolut	Relatif (%)
Paser	30.459,51	30.230,50	-229,01	-0,75
Kutai Barat	697,54	1.175,83	478,29	68,57
Kutai Kartanegara	64.530,52	60.750,49	-3.780,03	-5,86
Kutai Timur	9.934,06	7.631,26	-2.302,80	-23,18
Berau	13.583,55	13.008,91	-574,64	-4,23
Penajam Paser Utara	27.348,90	24.505,74	-2.843,16	-10,40
Mahakam Ulu	629,22	542,17	-87,05	-13,83
Balikpapan	244,05	205,99	-38,06	-15,60
Samarinda	5.032,37	4.065,23	-967,14	-19,22
Bontang	190,12	205,26	15,14	7,96
Kalimantan Timur	152.649,84	142.321,38	-10.328,46	-6,77

Tabel 4.3. Perkembangan Produksi Padi Tahun 2020 dan 2021 Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur (BPS KALTIM, 2021)

Kabupaten/Kota	Produksi Padi (Ton-GKG)			
	2020	2021	Perkembangan	
			Absolut	Relatif (%)
Paser	52.365,75	51.972,06	-393,69	-0,75
Kutai Barat	1.199,22	2.021,46	822,24	68,56
Kutai Kartanegara	110.940,44	104.441,83	-6.498,61	-5,86
Kutai Timur	17.078,56	13.119,61	-3.958,95	-23,18
Berau	23.352,73	22.364,87	-987,86	-4,23
Penajam Paser Utara	47.018,03	42.130,12	-4.887,91	-10,40
Mahakam Ulu	1.081,75	932,09	-149,66	-13,83
Balikpapan	419,57	354,13	-65,44	-15,60
Samarinda	8.651,61	6.988,91	-1.662,70	-19,22
Bontang	326,86	352,88	26,02	7,96
Kalimantan Timur	262.434,52	244.677,96	-17.756,56	-6,77

Tabel 4.4. Perkembangan Luas Panen Padi Tahun 2020 dan 2021 Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur (BPS KALTIM, 2021)

Kabupaten/Kota	Luas Panen (ha)			
	2020	2021	Perubahan	
			Absolut	Relatif (%)
Paser	12.825,60	13.137,77	312.17	2,43
Kutai Barat	510,78	527,89	17.11	3,35
Kutai Kartanegara	31.952,96	27.635,02	-4317.94	-13,51
Kutai Timur	4.978,75	3.660,48	-1318.27	-26,48
Berau	6.461,68	5.756,54	-705.14	-10,91
Penajam Paser Utara	13.924,41	13.501,60	-422.81	-3,04
Mahakam Ulu	464,44	232,22	-232.22	-50,00
Balikpapan	118,31	102,67	-15.64	-13,22
Samarinda	2.250,75	1.632,33	-618.42	-27,48
Bontang	80,76	82,94	2.18	2,70

**Tabel 4.5. Luas Lahan Baku Sawah Kalimantan Timur
(Sumber: SK Menteri ATR Nomor: 686/SK-PG.03.03/XII/2019).**

No	Kabupaten/Kota	Luas GIS (ha)	Keterangan
1	Paser	2.750	
2	Kutai Barat	945	
3	Kutai Kartanegara	18.550	
4	Kutai Timur	1.730	
5	Berau	2.082	
6	Penajam Paser Utara	8.963	
7	Mahakam Ulu	-	Masih tergabung dengan Kutai Barat
8	Balikpapan	148	
9	Samarinda	1.183	
10	Bontang	49	
Total Kalimantan Timur		36.399	

HASIL KAJIAN DAN DISKUSI

Tabel 5.1. Hasil Evaluasi (skoring) Program LPM di Desa Sebuntal, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator Tujuan	Responden							Total Skor	Rata-rata
		1	2	3	4	5	6	7		
1.1	Sumber dana APBN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Sumber dana APBD Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Sumber dana APBD Kabupaten	1	1	1	1	1	1	1	7	1,00
2.1	Tata Kelola/ pengelolaan LPM	1	1	1	1	1	1	1	7	1,00
2.2	Pola kemitraan	1	1	1	1	2	1	1	8	1,14
2.3	Permasalahan dalam pengelolaan LPM	1	1	1	1	1	1	1	7	1,00
3.1	Pembinaan dan pendampingan LPM	1	1	2	1	1	1	1	8	1,14
3.2	Jumlah OPD atau para pihak yang melakukan pembinaan	1	1	1	1	1	1	1	7	1,00
3.3	Esistensi LPM	1	1	1	2	2	1	1	9	1,29
	Total								53	1,08

Keterangan Skor: 1 = rendah atau kurang; 2 = sedang; 3 = tinggi atau baik.

Tabel 5.2. Hasil Evaluasi (skoring) Program LPM di Kelurahan Tama Pole, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara.

No	Indikator Tujuan	Responden							Total Skor	Rata-rata
		1	2	3	4	5	6	7		
1.1	Sumber dana APBN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Sumber dana APBD Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Sumber dana APBD Kabupaten	2	2	1	2	1	1	2	11	1,57
2.1	Tata Kelola/ pengelolaan LPM	1	1	1	1	1	1	1	7	1,00
2.2	Pola kemitraan	1	1	1	1	2	1	1	8	1,14
2.3	Permasalahan dalam pengelolaan LPM	1	1	1	1	1	1	1	7	1,00
3.1	Pembinaan dan pendampingan LPM	2	1	2	1	1	1	1	9	1,29
3.2	Jumlah OPD atau para pihak yang melakukan pembinaan	1	1	1	1	1	1	1	7	1,00
3.3	Esistensi LPM	2	1	2	1	2	1	1	10	1,43
	Total								59	1,20

Keterangan Skor: 1 = rendah atau kurang; 2 = sedang; 3 = tinggi atau baik.

**Tabel 5.3. Hasil Evaluasi (skoring) Program LPM di Desa Sidomulyo,
Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara**

No	Indikator Tujuan	Responden							Total Skor	Rata-rata
		1	2	3	4	5	6	7		
1.1	Sumber dana APBN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Sumber dana APBD Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Sumber dana APBD Kabupaten	2	2	2	2	2	2	2	14	2,00
2.1	Tata Kelola/pengelolaan LPM	1	1	1	1	1	1	1	7	1,00
2.2	Pola kemitraan	1	1	1	1	1	1	1	7	1,00
2.3	Permasalahan dalam pengelolaan LPM	2	1	1	1	1	1	1	8	1,14
3.1	Pembinaan dan pendampingan LPM	2	2	1	1	2	1	2	11	1,57
3.2	Jumlah OPD atau para pihak yang melakukan pembinaan	1	1	1	1	1	1	1	7	1,00
3.3	Esistensi LPM	2	2	2	2	2	2	2	14	2,00
	Total								68	1,39

Keterangan Skor: 1 = rendah atau kurang; 2 = sedang; 3 = tinggi atau baik.

**Tabel 5.4. Hasil Evaluasi (skoring) Program LPM di Desa Karya Jaya,
Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara**

No	Indikator Tujuan	Responden							Total Skor	Rata-rata
		1	2	3	4	5	6	7		
1.1	Sumber dana APBN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Sumber dana APBD Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Sumber dana APBD Kabupaten	1	1	2	1	1	1	1	8	1,14
2.1	Tata Kelola/ pengelolaan LPM	1	1	1	1	1	1	1	7	1,00
2.2	Pola kemitraan	1	1	1	2	1	1	1	8	1,14
2.3	Permasalahan dalam pengelolaan LPM	1	1	1	1	1	1	1	7	1,00
3.1	Pembinaan dan pendampingan LPM	1	1	2	1	1	1	1	8	1,14
3.2	Jumlah OPD atau para pihak yang melakukan pembinaan	1	1	1	1	1	1	1	7	1,00
3.3	Esistensi LPM	1	1	1	1	1	1	1	7	1,00
	Total								52	1,06

Keterangan Skor: 1 = rendah atau kurang; 2 = sedang; 3 = tinggi atau baik.

Tabel 5.5. Hasil Evaluasi (skoring) Program LPM di Desa Sumber Sari, Kecamatan Loa-Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator Tujuan	Responden							Total Skor	Rata-rata
		1	2	3	4	5	6	7		
1.1	Sumber dana APBN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Sumber dana APBD Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Sumber dana APBD Kabupaten	3	3	3	2	2	1	1	15	2,14
2.1	Tata Kelola/pengelolaan LPM	2	2	2	2	2	1	1	12	1,71
2.2	Pola kemitraan	1	1	1	2	1	1	1	8	1,14
2.3	Permasalahan dalam pengelolaan LPM	1	1	2	2	1	1	1	9	1,29
3.1	Pembinaan dan pendampingan LPM	1	1	2	2	1	1	1	9	1,29
3.2	Jumlah OPD atau para pihak yang melakukan pembinaan	1	1	2	1	1	1	1	8	1,14
3.3	Esistensi LPM	2	2	2	2	2	1	1	12	1,71
	Total								73	1,55

Keterangan Skor: 1 = rendah atau kurang; 2 = sedang; 3 = tinggi atau baik.

Tabel 5.6. Hasil Evaluasi (skoring) Program LPM di Desa Loa-Lepu, Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator Tujuan	Responden							Total Skor	Rata-rata
		1	2	3	4	5	6	7		
1.1	Sumber dana APBN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Sumber dana APBD Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Sumber dana APBD Kabupaten	1	1	1	1	1	1	1	7	1,00
2.1	Tata Kelola/ pengelolaan LPM	1	1	1	1	1	1	1	7	1,00
2.2	Pola kemitraan	1	1	1	1	1	1	1	7	1,00
2.3	Permasalahan dalam pengelolaan LPM	1	1	1	1	1	1	1	7	1,00
3.1	Pembinaan dan pendampingan LPM	1	1	1	1	1	1	1	7	1,00
3.2	Jumlah OPD atau para pihak yang melakukan pembinaan	1	1	1	1	1	1	1	7	1,00
3.3	Esistensi LPM	1	1	1	1	2	1	1	8	1,14
	Total								50	1,02

Keterangan Skor: 1 = rendah atau kurang; 2 = sedang; 3 = tinggi atau baik.

**Tabel 5.7. Hasil Evaluasi (skoring) Program LPM di Desa Muhuran,
Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara**

No	Indikator Tujuan	Responden							Total Skor	Rata-rata
		1	2	3	4	5	6	7		
1.1	Sumber dana APBN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Sumber dana APBD Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Sumber dana APBD Kabupaten	1	1	1	1	1	1	1	7	1,00
2.1	Tata Kelola/ pengelolaan LPM	1	1	1	1	1	1	1	7	1,00
2.2	Pola kemitraan	1	1	1	1	1	1	1	7	1,00
2.3	Permasalahan dalam pengelolaan LPM	1	1	1	1	1	1	1	7	1,00
3.1	Pembinaan dan pendampingan LPM	1	1	2	2	1	1	1	9	1,29
3.2	Jumlah OPD atau para pihak yang melakukan pembinaan	1	1	1	1	1	1	1	7	1,00
3.3	Esistensi LPM	1	1	1	1	1	2	2	9	1,29
	Total								53	1,08

Keterangan Skor: 1 = rendah atau kurang; 2 = sedang; 3 = tinggi atau baik.

**Tabel 5.8. Hasil Evaluasi (skoring) Program LPM di Desa Panca Jaya,
Kecamatan Kota Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara**

No	Indikator Tujuan	Responden							Total Skor	Rata-rata
		1	2	3	4	5	6	7		
1.1	Sumber dana APBN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Sumber dana APBD Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Sumber dana APBD Kabupaten	1	1	2	1	2	1	1	9	1,29
2.1	Tata Kelola/pengelolaan LPM	1	1	1	1	1	1	1	7	1,00
2.2	Pola kemitraan	1	1	1	2	1	1	1	8	1,14
2.3	Permasalahan dalam pengelolaan LPM	1	1	1	1	1	1	1	7	1,00
3.1	Pembinaan dan pendampingan LPM	3	1	3	1	2	1	1	12	1,71
3.2	Jumlah OPD atau para pihak yang melakukan pembinaan	2	1	1	1	1	1	1	8	1,14
3.3	Esistensi LPM	1	1	1	2	2	2	1	10	1,43
	Total								61	1,24

Keterangan Skor: 1 = rendah atau kurang; 2 = sedang; 3 = tinggi atau baik.

DISKUSI

Ditinjau dari aspek kondisi fisik bangunan LPM, berdasarkan delapan sampel lumbung yang diobservasi terdapat satu unit lumbung yang telah dialih fungsikan (di Desa Loa-Lepu, Kecamatan Tenggara Seberang), ada yang telah mengalami kerusakan (di Desa Sebuntal – Kecamatan Marang Kayu, Desa Karya Jaya – Kecamatan Samboja, Desa Muhuran – Kecamatan Kota Bangun, Desa Panca Jaya – Kecamatan Muara Kaman), dan ada yang masih dalam kondisi baik (di Desa Tama Pole – Kecamatan Muara Jawa, Desa Sidomulyo – Kecamatan Anggana, Desa Sumber Sari – Kecamatan Loa-Kulu).

Ditinjau dari aspek tata kelola/pengelolaan LPM, pada umumnya LPM yang diobservasi belum dikelola dengan baik, kecuali untuk LPM Desa Sumber Sari di Kecamatan Loa-Kulu. Pengelolaan LPM belum/tidak memiliki kepengurusan yang pasti, kondisi demikian berdampak pada tidak tersusunnya RUK (rencana usaha kelompok), ADART, ataupun POS (prosedur operasional standar) untuk pengelolaan LPM. Sehingga pengembangan LPM sulit dilakukan, terutama untuk melakukan kemitraan dengan para pihak, dan banyak menimbulkan permasalahan yang tidak dapat dipecahkan.

Kondisi pengelolaan LPM seperti diuraikan di atas, berkaitan erat dengan terbatasnya kegiatan pembinaan dan pendampingan oleh OPD yang berwenang. Oleh karena program LPM ini pada dasarnya merupakan program yang bersifat "*top-down*", maka kesiapan penerimaan masyarakat sangat variatif. Kultur masyarakat petani kita dalam menerima program yang bersifat "*top-down*" sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah, termasuk kegiatan pembinaan dan pendampingan. Bilamana kegiatan pembinaan dan pendampingan tidak dilakukan secara intensif, sangat sulit program tersebut dapat berjalan dengan baik.

Tujuan Permentan 17/2015

- 1) meningkatkan volume stok cadangan pangan di kelompok lumbung pangan untuk menjamin akses dan kecukupan pangan bagi anggotanya terutama yang mengalami kerawanan pangan;
- 2) meningkatkan kemampuan pengurus dan anggota kelompok dalam pengelolaan cadangan pangan; dan
- 3) meningkatkan fungsi kelembagaan cadangan pangan masyarakat dalam penyediaan pangan secara optimal dan berkelanjutan.

Penilaian Program LPM

Indikator Output

- 1) tersalurnya Dana Belanja Bantuan Sosial untuk pembelian cadangan pangan dan pengustan kelembagaan kelompok; dan
- 2) terlaksananya fasilitasi peningkatan kemampuan dalam pengelolaan lumbung pangan.

Indikator Outcome

- 1) tersedianya dan berkembangnya cadangan pangan milik kelompok secara berkelanjutan; dan
- 2) meningkatnya kemampuan kelompok dalam pengelolaan lumbung pangan.

Indikator Benefit

Terbangunnya pengelolaan kelembagaan Lumbung Pangan masyarakat yang mandiri dan berkelanjutan.

Indikator Impact

Tercukupinya kebutuhan pangan masyarakat sepanjang waktu.

Pengembangan Program dan Kegiatan LPM

Pengembangan program dan kegiatan LPM alternatif dengan tetap berpedoman pada Permentan 17/2015, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Dalam pasal (2) Permentan 17/2015 dinyatakan: *Pedoman Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan Program **Peningkatan Diversifikasi** dan **Ketahanan Pangan Masyarakat** Tahun 2015 dengan aktivitas-aktivitas prioritas nasional.*
- 2) Dalam Bab I, huruf D. Pengertian, Nomor 7. *Kelompok Lumbung Pangan adalah **kelembagaan Cadangan Pangan** yang dibentuk oleh masyarakat desa/kota dan **dikelola secara berkelompok** yang bertujuan untuk pengembangan **penyediaan Cadangan Pangan** bagi masyarakat di suatu wilayah.*

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan data dan informasi yang dapat dikumpulkan dari hasil observasi LPM di lapangan dan analisis yang telah dilakukan, dalam kajian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Kondisi fisik bangunan lumbung yang diobservasi, dari delapan unit lumbung: satu bangunan lumbung telah dialih fungsikan menjadi balai pertemuan, empat bangunan lumbung dalam kondisi rusak berat hingga ringan, dan tiga unit bangunan lumbung dalam kondisi baik.
- 2) Secara umum LPM yang diobservasi belum dikelola dengan baik, kecuali untuk LPM Desa Sumber Sari di Kecamatan Loa-Kulu. Pengelolaan LPM belum/tidak memiliki kepengurusan yang depinitif, sehingga berdampak pada tidak tersusunnya RUK (rencana usaha kelompok), ADART, ataupun POS (prosedur operasional standar) untuk pengelolaan LPM.
- 3) Kegiatan pembinaan dan pendampingan pengelolaan LPM oleh OPD yang berwenang tidak berjalan dengan lancar. Sehingga peningkatan kualitas SDM pengelola LPM dan peningkatan kualitas kelembagaan LPM tidak terjadi seperti yang diharapkan.

Rekomendasi

Sesuai dengan kesimpulan yang diuraikan di atas, dan dalam upaya perbaikan atau pengembangan program dan kegiatan dalam implementasi kebijakan ketahanan pangan, khususnya dalam hal pengelolaan LPM di Kabupaten Kutai Kartanegara pada masa mendatang, diajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengembangan LPM yang telah memiliki bangunan lumbung permanen yang representatif, didukung dengan peningkatan kualitas SDM pengelola dan kualitas kelembagaan LPM, sehingga dapat melakukan pengelolaan LPM dengan baik seperti koperasi atau BUMDES yang sehat dan menguntungkan.

- 2) Menumbuhkan LPM di lokus sentra budidaya padi yang produksinya selalu surplus, dengan model pendekatan seperti pada nomor 1). Didukung dengan dana penyangga panen (sebagai subsidi *output*) untuk membeli padi saat panen pada tingkat harga yang tetap menguntungkan petani, agar petani tetap semangat memproduksi. LPM akan mendapat keuntungan dengan menjual padi atau beras pada saat harganya sudah normal atau bahkan meningkat.
- 3) Menumbuhkan atau mengembangkan LPM di desa-desa yang beresiko rawan pangan (beras), dengan fokus pembinaan untuk mewujudkan level *iron stock* dengan pembaruan cadangan pangan yang disimpan secara berkala.
- 4) Mengembangkan LPM “alami” dengan membudidayakan tanaman pokok alternatif (seperti tanaman rumbia atau sagu) sebagai cadangan pangan masyarakat desa, yang dapat dipanen setiap saat pada kondisi “darurat rawan pangan” dan dalam kondisi normal dapat dipanen sebagai bahan pangan pokok alternatif (diversifikasi pangan) atau sebagai komoditas perdagangan untuk sumber penghasilan masyarakat desa.